



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pememerintah Daerah dan DPRD;

PERANGKAT DAERAH	
KAGAG HUKUM	
ASISTEN	
KEBID	

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
KEUDA	19

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. semula	Rp.	1.116.944.908.905,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	(10.439.627.000,00)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.106.505.281.905,00

2. Belanja :

a. semula	Rp.	1.084.712.015.755,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	(9.245.995.917,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.075.466.019.838,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	31.039.262.067,00

3. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp.	12.400.000.000,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	(163.891.810,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	12.236.108.190,00



2. Pengeluaran pembiayaan		
a. semula	Rp.	44.632.893.150,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	(1.357.522.893,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	43.275.370.257,00
Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	(31.039.262.067,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00
Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Rp.	1.118.741.390.095,00

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
a. semula	Rp.	364.506.051.148,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	18.314.541.514,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	382.820.592.662,00
b. Pendapatan transfer		
a. semula	Rp.	730.724.316.243,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	(13.665.627.000,00)
Jumlah dana transfer setelah perubahan	Rp.	717.058.689.243,00



c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf c		
a.	semula	Rp.	21.714.541.514,00
b.	bertambah/berkurang	Rp.	(15.088.541.514,00)
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang setelah perubahan	Rp.	6.626.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a.	Pajak Daerah		
a.	semula	Rp.	116.404.000.000,00
b.	bertambah/berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	116.404.000.000,00
b.	Retribusi Daerah		
a.	semula	Rp.	238.243.190.500,00
b.	bertambah/berkurang	Rp.	6.600.000.000,00
	Jumlah retribusi setelah perubahan	Rp.	244.843.190.500,00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
a.	semula	Rp.	5.500.000.000,00
b.	bertambah/berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah setelah perubahan	Rp.	5.500.000.000,00



d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah

a. semula	Rp.	4.358.860.648,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	11.714.541.514,00
Jumlah lain-lain pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	16.073.402.162,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. semula	Rp.	696.751.300.000,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	(13.665.627.000,00)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.	683.085.673.000,00

b. Pendapatan Transfer antar Daerah

a. semula	Rp.	33.973.016.243,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp.	33.973.016.243,00

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

a. Pendapatan Hibah

a. semula	Rp.	0,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	626.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.	626.000.000,00



b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
a. semula	Rp.	21.714.541.514,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	(15.714.541.514,00)
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Operasi		
semula	Rp.	1.001.604.102.013,00
bertambah/berkurang	Rp.	(13.697.366.019,00)
Jumlah belanja Operasi setelah Perubahan	Rp.	987.906.735.994,00
b. Belanja Modal		
semula	Rp.	78.407.913.742,00
bertambah/berkurang	Rp.	(20.962.689,00)
Jumlah belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	78.386.951.053,00



c. Belanja Tidak terduga		
semula	Rp.	3.500.000.000,00
bertambah/berkurang	Rp.	5.072.332.791,00
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	8.572.332.791,00
d. Belanja Transfer		
semula	Rp.	1.200.000.000,00
bertambah/berkurang	Rp.	(600.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	600.000.000,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 1 terdiri dari:

a. Belanja Pegawai		
semula	Rp.	503.666.410.098,56
bertambah/berkurang	Rp.	(18.878.826.495,60)
Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	484.787.583.602,96
b. Belanja Barang dan Jasa		
semula	Rp.	489.149.381.471,44
bertambah/berkurang	Rp.	(1.165.129.436,60)
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	490.314.510.908,04



c. Belanja Hibah

semula	Rp.	6.538.995.443,00
bertambah/berkurang	Rp.	3.435.231.040,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	9.974.226.483,00

d. Belanja Bantuan Sosial

semula	Rp.	2.249.315.000,00
bertambah/berkurang	Rp.	581.100.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	2.830.415.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 1 terdiri dari:

a.. Belanja Modal tanah

semula	Rp.	5.000.000,00
bertambah/berkurang	Rp.	204,00
Jumlah belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp.	5.000.204,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

semula	Rp.	39.016.541.126,00
bertambah/berkurang	Rp.	3.091.033.837,00
Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp.	42.107.574.963,00



c. Belanja Modal gedung dan Bangunan		
semula	Rp.	19.968.882.413,00
bertambah/berkurang	Rp.	2.840.915,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp.	19.966.041.498,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
semula	Rp.	17.517.263.537,00
bertambah/berkurang	Rp.	(3.222.829.815,00)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan	Rp.	14.294.433.722,00
e. Belanja Modal Aset tetap lainnya		
semula	Rp.	1.900.226.666,00
bertambah/berkurang	Rp.	63.674.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp.	1.963.900.666,00
f. Belanja Modal Aset lainnya		
semula	Rp.	0,00
bertambah/berkurang	Rp.	50.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset lainnya setelah Perubahan	Rp.	50.000.000,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 1 huruf C		
a. Belanja Tidak Terduga		
semua	Rp.	3.500.000.000,00



bertambah/berkurang Rp. 5.072.332.791,00

Jumlah belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 8.572.332.791,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf d

a. Belanja Bantuan Keuangan

semula Rp. 1.200.000.000,00

bertambah/berkurang Rp. (600.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan Rp. 600.000.000,00

Pasal 4

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan sejumlah

1). Semula Rp. 12.400.000.000,00

2). Bertambah/berkurang Rp. (163.891.810,00)

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 12.236.108.190,00

b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah

1). Semula Rp. 44.632.893.150,00

2). Bertambah/berkurang Rp. (1.357.522.893,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 43.275.370.257,00



(2). Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1). Semula	Rp.	12.400.000.000,00
2). Bertambah/berkurang	Rp.	(163.891.810,00)
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	12.236.108.190,00

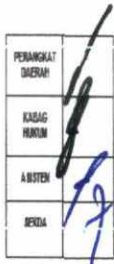
(3). Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1). Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang).	Rp.	0,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

c. Pembayaran cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sejumlah

1). Semula	Rp.	42.632.893.150,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.357.522.893,00)
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	41.275.370.257,00



Pasal 5

- (1) Dalam kondisi tertentu, pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum dan atau setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui ketetapan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi darurat, mendesak dan perubahan Prioritas Pembangunan baik di Tingkat Nasional atau Daerah dan/atau telah ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;
  - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan / atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan / atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;
  - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat di prediksi sebelumnya serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan / atau

PERANGKAT DAERAH	
KADAG HUKUM	
A.B.UTEN	
SENDA	

- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat;
- (5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat di lakukan sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jika Pergeseran tersebut dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di Laporkan dalam Realisasi Anggaran.

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di klasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta sub keluaran kota gorontalo Tahun Anggaran 2025;



5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
10. Lampiran X Daftar Jumlah pegawai Pergolongan dan Perjabatan Tahun Anggaran 2025;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025;

Pasal 7

Wali Kota Gorontalo menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

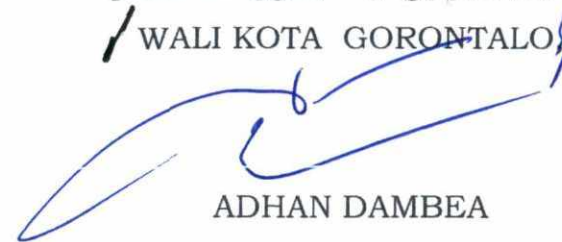
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal, 8 September 2025

WALI KOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal, 8 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

PEMBANGKAL DAERAH	/
KABAG. HUKUM	/
ASISTEN	/
REVISI	/

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 4,

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : ( 4/20/2025 )



Lampiran I : Peraturan Daerah  
Nomor : 04 Tahun 2025  
Tanggal : 8 September 2025

**KOTA GORONTALO**  
**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>364.506.051.148,00</b>	<b>382.820.592.662,00</b>	<b>18.314.541.514,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	116.404.000.000,00	116.404.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	238.243.190.500,00	244.843.190.500,00	6.600.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.358.860.648,00	16.073.402.162,00	11.714.541.514,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>730.724.316.243,00</b>	<b>717.058.689.243,00</b>	<b>-13.665.627.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	696.751.300.000,00	683.085.673.000,00	-13.665.627.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.973.016.243,00	33.973.016.243,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>21.714.541.514,00</b>	<b>6.626.000.000,00</b>	<b>-15.088.541.514,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	626.000.000,00	626.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21.714.541.514,00	6.000.000.000,00	-15.714.541.514,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.116.944.908.905,00</b>	<b>1.106.505.281.905,00</b>	<b>-10.439.627.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.001.604.102.013,00</b>	<b>987.906.735.994,00</b>	<b>-13.697.366.019,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	503.666.410.098,56	484.787.583.602,96	-18.878.826.495,60
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.149.381.471,44	490.314.510.908,04	1.165.129.436,60
5.1.05	Belanja Hibah	6.538.995.443,00	9.974.226.483,00	3.435.231.040,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.249.315.000,00	2.830.415.000,00	581.100.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>78.407.913.742,00</b>	<b>78.386.951.053,00</b>	<b>-20.962.689,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.000.000,00	5.000.204,00	204,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.016.541.126,00	42.107.574.963,00	3.091.033.837,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.968.882.413,00	19.966.041.498,00	-2.840.915,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.517.263.537,00	14.294.433.722,00	-3.222.829.815,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.900.226.666,00	1.963.900.666,00	63.674.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>8.572.332.791,00</b>	<b>5.072.332.791,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	8.572.332.791,00	5.072.332.791,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>-600.000.000,00</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.200.000.000,00	600.000.000,00	-600.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.084.712.015.755,00</b>	<b>1.075.466.019.838,00</b>	<b>-9.245.995.917,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>32.232.893.150,00</b>	<b>31.039.262.067,00</b>	<b>-1.193.631.083,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>12.400.000.000,00</b>	<b>12.236.108.190,00</b>	<b>-163.891.810,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.400.000.000,00	12.236.108.190,00	-163.891.810,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>44.632.893.150,00</b>	<b>43.275.370.257,00</b>	<b>-1.357.522.893,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	42.632.893.150,00	41.275.370.257,00	-1.357.522.893,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>44.632.893.150,00</b>	<b>43.275.370.257,00</b>	<b>-1.357.522.893,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>-32.232.893.150,00</b>	<b>-31.039.262.067,00</b>	<b>1.193.631.083,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkeanaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

  
 WALI KOTA GORONTALO  
 ADHAN DAMBEA



**KOTA GORONTALO**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja									Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang	
		Sebelum	Sesudah	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	226.525.000.000,00	244.839.541.514,00	655.223.134.837,00	656.847.414.205,00	54.849.933.258,00	51.172.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073.068.095,00	708.020.122.205,00	-2.052.945.890,00		
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	275.000.000,00	275.000.000,00	236.797.841.707,00	226.207.181.778,00	9.846.502.484,00	16.158.010.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.644.344.191,00	242.365.192.484,00	-4.279.151.707,00	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan	275.000.000,00	275.000.000,00	236.797.841.707,00	226.207.181.778,00	9.846.502.484,00	16.158.010.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.644.344.191,00	242.365.192.484,00	-4.279.151.707,00
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	219.640.500.000,00	237.955.041.514,00	369.662.772.006,00	378.596.190.169,00	25.203.884.157,00	19.139.934.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.866.656.163,00	397.736.124.621,00	2.869.468.458,00	
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0000	Dinas Kesehatan	1.632.500.000,00	532.500.000,00	152.043.224.928,00	148.087.327.267,00	2.573.142.599,00	1.689.464.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.616.367.527,00	149.776.792.166,00	-4.839.575.361,00
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0001	Puskesmas Pilodada	0,00	993.231.971,00	1.312.463.021,00	1.420.666.021,00	107.426.800,00	94.916.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.889.821,00	1.515.582.821,00	95.693.000,00
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0002	Puskesmas Kota Timur	0,00	1.456.048.716,00	1.923.154.980,00	2.012.939.480,00	52.616.500,00	60.644.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.771.480,00	2.073.583.980,00	97.812.500,00
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0003	Puskesmas Kota Barat	0,00	1.099.435.845,00	1.376.861.145,00	1.533.253.195,00	118.082.500,00	75.525.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.943.645,00	1.608.778.895,00	113.835.250,00
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0004	Puskesmas Kota Tengah	0,00	1.774.720.607,00	2.093.770.227,00	2.309.391.927,00	127.453.700,00	109.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.223.927,00	2.418.578.927,00	197.355.000,00
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0005	Puskesmas Dungiingi	0,00	1.435.179.696,00	1.776.606.617,00	1.876.443.480,00	157.911.275,00	157.910.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.517.892,00	2.034.353.892,00	99.836.000,00
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0006	Puskesmas Kota Utara	0,00	1.477.244.366,00	1.880.866.681,00	2.014.018.206,00	50.776.925,00	58.552.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.643.606,00	2.072.570.606,00	140.927.000,00
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0007	Puskesmas Kota Selatan	0,00	1.335.333.669,00	1.677.460.062,00	1.758.226.420,00	117.446.207,00	112.436.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.906.269,00	1.870.663.269,00	75.757.000,00
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0008	Puskesmas Dumbo Raya	0,00	1.091.927.741,00	1.552.008.411,00	1.606.298.361,00	76.723.200,00	91.309.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.731.611,00	1.697.607.461,00	68.875.850,00
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0009	Puskesmas Hulonthalangi	0,00	1.039.118.610,00	1.379.627.060,00	1.509.688.260,00	123.754.100,00	95.200.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.381.160,00	1.604.888.560,00	101.507.400,00
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0010	Puskesmas Sapatana	0,00	1.112.300.293,00	1.462.152.135,00	1.570.553.135,00	80.130.968,00	80.130.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.283.103,00	1.650.684.103,00	108.401.000,00
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0011	Rumah Sakit Aloe'i Saboei	172.400.000.000,00	178.000.000.000,00	156.486.766.926,00	164.715.373.019,00	19.472.233.074,00	15.352.476.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.959.000.000,00	180.067.849.812,00	4.108.849.812,00
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0012	RSUD Otanaha	45.608.000.000,00	46.608.000.000,00	44.697.809.813,00	48.182.011.398,00	2.146.186.309,00	1.162.178.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.843.996.122,00	49.344.190.129,00	2.500.194.007,00
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.204.500.000,00	6.204.500.000,00	14.411.614.556,00	16.785.461.684,00	18.567.263.537,00	15.485.546.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.978.878.093,00	32.271.008.406,00	-707.869.687,00	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.204.500.000,00	6.204.500.000,00	14.411.614.556,00	16.785.461.684,00	18.567.263.537,00	15.485.546.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.978.878.093,00	32.271.008.406,00	-707.869.687,00
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	405.000.000,00	405.000.000,00	10.673.362.981,00	8.770.086.081,00	988.713.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.662.076.661,00	8.770.086.081,00	-2.891.990.580,00	

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja								Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang		
		Sebelum	Sesudah	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	4.810.534.784,00	5.608.459.180,00	275.170.800,00	25.139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085.705.584,00	5.633.598.980,00	547.893.396,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1.116.944.908.905,00</b>	<b>1.106.505.281.905,00</b>	<b>1.001.604.102.013,00</b>	<b>987.906.735.994,00</b>	<b>78.407.913.742,00</b>	<b>78.386.951.053,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>8.572.332.791,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>1.084.712.015.755,00</b>	<b>1.075.466.019.838,00</b>	<b>-9.245.995.917,00</b>

  
 WALI KOTA GORONTALO  
 ADHAN DAMBEA



**KOTA GORONTALO**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,**  
**SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

PENDAPATAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.116.944.908.905,0 0	1.106.505.281.905,0 0	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	364.506.051.148,00	382.820.592.662,00	
4.1.01	Pajak Daerah	116.404.000.000,00	116.404.000.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	238.243.190.500,00	244.843.190.500,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.358.860.648,00	16.073.402.162,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	730.724.316.243,00	717.058.689.243,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	696.751.300.000,00	683.085.673.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.973.016.243,00	33.973.016.243,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	21.714.541.514,00	6.626.000.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	626.000.000,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21.714.541.514,00	6.000.000.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan			
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah			
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.057.600,00	14.057.600,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.894.000,00	58.394.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.160.000,00	727.320.000,00	

**PEMBIAYAAN DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.400.000.000,00	12.236.108.190,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.400.000.000,00	12.236.108.190,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.632.893.150,00	43.275.370.257,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	42.632.893.150,00	41.275.370.257,00	

WALI KOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA



**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN  
 KOTA GORONTALO  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Sumber Dana	
					Pagu Indikatif Belanja (Rp)											
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Dinas Pendidikan														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen												
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	15 Dokumen												
1	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen												
8	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target											Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	368.160.000,00	727.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.160.000,00	727.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  
 WALI KOTA GORONTALO  
 ADHAN DAMBEA



**KOTA GORONTALO**  
**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Kode	Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah				
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Sebelum	Sesudah			
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1														
1	01	1	01	PELAYANAN UMUM										
1	01	1	01	Pendidikan	190.782.312.643,00	184.717.970.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.782.312.643,00	184.717.970.082,00
1	01	1	02	Kesehatan	316.915.093.193,00	336.682.976.878,00	18.149.392.997,00	12.935.295.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.064.486.190,00	349.618.272.731,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.010.216.456,00	10.508.779.556,00	0,00	62.971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010.216.456,00	10.571.750.556,00
1	01	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.719.987.781,00	3.629.535.836,00	988.713.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708.701.461,00	3.629.535.836,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	14.029.803.138,00	17.108.677.458,00	43.739.400,00	125.265.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073.542.538,00	17.233.943.358,00
1	01	1	06	Sosial	5.176.264.409,00	4.999.667.335,00	199.830.000,00	257.448.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376.094.409,00	5.257.115.355,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	5.264.672.546,00	5.180.572.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264.672.546,00	5.180.572.931,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.765.089.718,00	4.667.956.187,00	122.262.900,00	131.967.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887.352.618,00	4.799.923.287,00
1	01	2	09	Pangan	4.088.936.178,00	4.003.061.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.936.178,00	4.003.061.639,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	6.703.830.120,00	6.202.401.956,00	61.274.300,00	43.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765.104.420,00	6.246.099.956,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.715.493.425,00	4.142.510.808,00	297.045.800,00	84.267.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012.539.225,00	4.226.778.508,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	349.999.500,00	190.195.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.999.500,00	190.195.100,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Sebelum	Sesudah
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
8	10	2	23	Perpustakaan	196.243.575,0 0	196.243.575, 00	103.756.425, 00	103.756.425, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,0 0	300.000.000,0 0
9				PERLINDUNGAN SOSIAL										
9	11	1	06	Sosial	2.662.011.040, 00	2.405.689.80 0,00	0,00	6.502.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662.011.040, 00	2.412.192.000, 00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.029.810.800, 00	909.395.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.810.800, 00	909.395.000,0 0
				<b>TOTAL</b>	<b>1.001.604.102. 013,00</b>	<b>987.906.735. 994,00</b>	<b>78.407.913.7 42,00</b>	<b>78.386.951.0 53,00</b>	<b>3.500.000.0 00,00</b>	<b>8.572.332.7 91,00</b>	<b>1.200.000.0 00,00</b>	<b>600.000.0 00,00</b>	<b>1.084.712.015. 755,00</b>	<b>1.075.466.019. 838,00</b>

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA



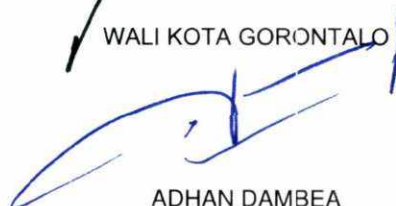
Lampiran VI : Peraturan Daerah  
Nomor : 04 Tahun 2025  
Tanggal : 8 September 2025

**KOTA GORONTALO**  
**REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A SPM Bidang Pendidikan				
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	0,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	831.182.000,00	165.000.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	0,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	100.000.000,00	100.000.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	797.600.000,00	627.370.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	442.500.000,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.000.700,00	19.848.700,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	484.081.900,00	173.736.700,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	30.000.400,00	25.913.400,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	94.479.400,00	119.333.400,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	0,00	0,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	54.670.700,00	54.670.700,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	531.310.000,00	102.695.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	199.665.000,00	842.207.282,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	500.000.000,00	440.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	600.000.000,00	1.418.880.000,00
Total			4.247.990.100,00	4.532.155.182,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancamar Bencana)	14.309.000,00	13.461.300,00
Total			14.309.000,00	13.461.300,00
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	43.843.800,00	29.625.300,00
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00
		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00
Total			243.843.800,00	29.625.300,00
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	124.325.000,00	180.575.000,00
Total			124.325.000,00	180.575.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			382.477.800,00	223.661.600,00
<b>F SPM Bidang Sosial</b>				
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	24.999.700,00	20.923.600,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	20.304.900,00	11.663.900,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	6.489.800,00	2.406.600,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	3.469.700,00	3.219.700,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	38.815.000,00	29.225.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	24.999.700,00	6.502.200,00
		Penyediaan Permakanan	553.674.800,00	543.155.000,00
		Penyediaan Sandang	74.741.000,00	51.427.700,00
Total			747.494.600,00	668.523.700,00
2.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	11.599.900,00	3.513.600,00
		Penyediaan Makanan	245.000.000,00	245.000.000,00
		Penyediaan Sandang	24.999.900,00	12.274.400,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	37.970.000,00	8.375.000,00
Total			319.569.800,00	269.163.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			1.067.064.400,00	937.686.700,00

WALI KOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA



**KOTA GORONTALO**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01 INSPEKTORAT DAERAH			
6	01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0,00	2.215.220.850,00	1.230.120.500,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.376.094.409,00	5.257.115.355,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL			
2	12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	0,00	70.251.600,00	36.307.700,00
2	09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	4.088.936.178,00	4.003.061.639,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01 KECAMATAN			
7	01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	11.073.129.700,00	10.540.456.200,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	359.569.900,00	290.687.900,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01 KECAMATAN			
7	01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	434.659.000,00	458.511.900,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01 INSPEKTORAT DAERAH			
6	01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0,00	1.806.694.400,00	741.450.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE	URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)			
			Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5		
2	12					
2	12	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAEUPATEN/KOTA	0,00	4.488.883.925,00	3.949.661.808,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0,00	3.862.656.025,00	2.588.955.825,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0,00	26.003.800,00	90.192.900,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	8.529.909.220,00	12.483.749.869,99
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	1.198.336.100,00	911.222.900,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0,00	92.983.000,00	74.228.000,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	279.999.700,00	114.755.000,00

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMEEA



**KOTA GORONTALO**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.22.0.00.02.0000						Dinas Pendidikan	247.476.414.746,00	247.476.414.746,00	243.205.350.084,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	246.113.509.096,00	246.113.509.096,00	242.365.192.484,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	246.113.509.096,00	246.113.509.096,00	242.365.192.484,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	56.461.662.680,00	56.461.662.680,00	57.201.644.802,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	30.023.576.430,00	30.023.576.430,00	30.535.903.178,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	299.980.500,00	299.980.500,00	299.980.500,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	476.100.000,00	476.100.000,00	476.100.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	646.312.556,00	646.312.556,00	646.166.600,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.101.658.000,00	1.101.658.000,00	1.635.959.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	474.945.000,00	474.945.000,00	359.527.500,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.997.547.719,00	1.997.547.719,00	2.150.099.423,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.882.200.000,00	15.882.200.000,00	15.882.200.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	875.912.200,00	875.912.200,00	866.612.200,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0,00	0,00	0,00

Kode					Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan	
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.580.000,00	195.580.000,00	195.580.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.232.500,00	97.232.500,00	105.106.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.742.500,00	57.742.500,00	60.060.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.490.000,00	19.490.000,00	24.120.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.926.400,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.066.762.882.603,00</b>	<b>1.067.120.405.496,00</b>	<b>1.075.466.019.838,00</b>	

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA



**KOTA GORONTALO**  
**SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM**  
**PRIORITAS KABUPATEN/KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kelurahan Dulalowo Timur	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	4.661.820.200,00	380.210.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661.820.200,00	380.210.200,00
3	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Wumalo	308.881.096,00	267.335.619,00	47.768.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.649.150,00	267.335.619,00
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Putubala	6.030.000,00	8.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00	8.040.000,00
5	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kelurahan Lekobalo	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sipatana	15.011.000,00	11.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.011.000,00	11.615.000,00
7	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kota Utara	1.863.246.681,00	579.056.240,00	50.776.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.023.606,00	579.056.240,00
8	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kelurahan Donggala	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
9	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Dungi	5.896.729.308,00	5.522.862.288,00	489.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897.218.608,00	5.522.862.288,00
10	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Biawu	208.704.500,00	83.210.500,00	0,00	123.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.704.500,00	207.004.500,00
11	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	2.293.028.000,00	2.689.308.000,00	20.500.000,00	180.819.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.528.000,00	2.870.127.300,00
12	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Keuangan	359.076.228,00	202.647.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.076.228,00	202.647.700,00
13	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Pohe	83.250.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.250.000,00	51.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
399	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	2.852.162.260,00	3.634.198.480,00	734.037.500,00	2.006.504.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586.199.760,00	5.640.702.870,00
400	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Keterlibatan dan Demokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Tenilo	60.750.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750.000,00	40.500.000,00
401	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Keterlibatan dan Demokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Bulotadaa Timur	47.164.700,00	11.714.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.164.700,00	11.714.700,00
402	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAGIAN ORGANISASI	553.239.485,00	296.723.902,00	131.986.841,00	3.419.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.226.326,00	300.143.479,00
403	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Keterlibatan dan Demokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	22.878.039.873,00	17.798.053.760,00	5.705.178,00	5.705.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.883.745.051,00	17.803.758.938,00
404	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Keterlibatan dan Demokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Paguyaman	38.129.400,00	11.179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.129.400,00	11.179.400,00
405	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Keterlibatan dan Demokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Ipiro	80.037.000,00	62.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.037.000,00	62.912.000,00
406	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Keterlibatan dan Demokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Lekobalo	52.139.975,00	33.103.874,00	34.135.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.275.000,00	33.103.874,00
407	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Keterlibatan dan Demokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Paguyaman	79.725.000,00	51.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.725.000,00	51.150.000,00
408	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Keterlibatan dan Demokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Libuo	98.650.000,00	66.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.650.000,00	66.100.000,00
409	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Keterlibatan dan Demokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Molosipat U	85.132.797,00	22.692.628,00	249.926.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.059.065,00	22.692.628,00
<b>TOTAL</b>					<b>837.359.842.862,00</b>	<b>811.355.938.193,00</b>	<b>48.300.438.579,00</b>	<b>47.128.701.169,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>8.572.332.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.160.281.441,00</b>	<b>867.056.972.153,00</b>

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA



Lampiran X : Peraturan Daerah  
Nomor : 04 Tahun 2025  
Tanggal : 3 September 2025

**KOTA GORONTALO**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e						4		4
Golongan IV/d	1					10		11
Golongan IV/c		21				222	1	244
Golongan IV/b		5	47	6		337	1	396
Golongan IV/a			63	22		245	9	339
Golongan III/e								
Golongan III/d			20	223		661	119	1023
Golongan III/c			1	100		217	96	414
Golongan III/b				45		159	115	319
Golongan III/a				2		146	193	341
Golongan II/e								
Golongan II/d						72	138	210
Golongan II/c						9	75	84
Golongan II/b						9	4	13
Golongan II/a						1	16	17
Golongan I/e								
Golongan I/d							1	1
Golongan I/c							4	4
Golongan I/b								
Golongan I/a								
PPPK						859		859

WALI KOTA GORONTALO

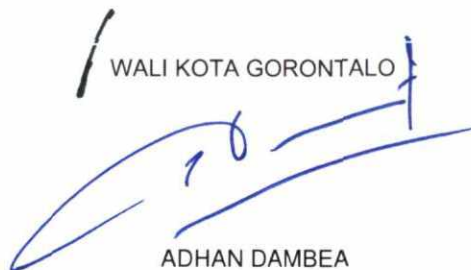
ADHAN DAMBEA



**KOTA GORONTALO**  
**DAFTAR PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan Tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1
1	Piutang Retribusi Jasa Ketatausahaan	2003	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
2	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2003	20.142.000,00	0,00	0,00	20.142.000,00
3	BAGIAN LANCAR TAGIHAN JANGKA PANJANG - DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT	2011	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
4	Piutang Retribusi Izin Perfilman	2014	3.403.000,00	0,00	0,00	3.403.000,00
5	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2017	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
6	BAGIAN LANCAR TGR	2024	42.744.922.582,21	6.164.928.656,19	909.960.815,26	47.999.890.423,14
7	PIUTANG BAGI HASIL PAJAK PROVINSI	2024	4.391.686.659,00	6.496.294.786,00	6.113.147.338,00	4.774.834.107,00
8	PIUTANG HASIL KERJA SAMA DAERAH	2024	13.037.869,00	21.390.818,13	12.385.669,00	22.043.018,13
9	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	2024	45.867.553,19	6.119,00	4.683.547,19	41.190.125,00
10	Piutang Pajak Air Tanah	2024	40.079.405,00	8.854.098,00	6.792.053,00	42.141.450,00
11	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2024	18.309.416.619,00	13.176.050.173,00	11.654.969.074,00	19.830.497.718,00
12	Piutang Pajak Hotel	2024	5.844.507,00	0,00	0,00	5.844.507,00
13	Piutang Pajak Parkir	2024	87.324.350,00	0,00	0,00	87.324.350,00
14	Piutang Pajak Penerangan Jalan	2024	2.037.304.794,00	2.021.406.537,00	2.037.304.794,00	2.021.406.537,00
15	Piutang Pajak Reklame	2024	3.722.281.644,00	945.803.755,00	401.848.819,50	4.266.236.579,50
16	Piutang Pajak Restoran	2024	610.489.201,00	0,00	90.343.910,00	520.145.291,00
17	PIUTANG PENDAPATAN BLUD	2024	14.111.565.821,00	0,00	14.111.565.821,00	0,00
18	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	2024	4.568.402.200,00	35.442.786.926,00	17.819.295.620,00	22.191.893.506,00
19	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2024	69.130.000,00	0,00	1.200.000,00	67.930.000,00
20	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	2024	2.475.346.600,00	2.653.380.000,00	243.019.500,00	4.885.707.100,00

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan Tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1
		Total	93.357.084.804,40	66.930.901.868,32	53.406.516.960,95	106.881.469.711,77


  
 WALI KOTA GORONTALO
   
 ADHAN DAMBEA